

PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA YANG DIPISAHKAN OLEH
BADAN HUKUM
(Analisis terhadap Kasus Kerugian Negara Yang Terjadi Pada
PT Pos Cabang Luar Kota Nanga Serawai)

DEDI IRAWAN
A.212210077

Abstract

It is juridical normative research. It analyze problem by literary research to get secondary data. To complete and support data obtained from literary study, a field study is also done to give descriptive picture, which describe problem object in thorough and systematic way.

This research was to identify and analyze if legal status of state wealth placed in PT Pos Outer City Branch Nanga Serawai and what is management responsibility on risk management of PT Pos Outer City Branch Nanga Serawai.

The result indicated state wealth placed in PT Pos Outer City Branch Nanga Serawai is state wealth placed State-Owned Enterprise so it is part of state wealth. Author agreed with consideration of Corruption court in Pontianak court examining case PT Pos Outer City Branch Nanga Serawai of Sintang Regency No: 01/Pid.Sus/Tipikor/2012/PN.PTK dated 4 April 2012. Responsibility on risk management of PT Pos Outer City Branch Nanga Serawai that have done fiduciary duty violation leading to personal responsibility so Rakhmad Yusuf was punished with criminal and civil responsibility. Indemnity placed on the accused Rakhmad Yusuf is personal responsibility over loss the corporate suffered because legal violation done by the accused have violated obligation that he should do. Therefore it is civil responsibility. Author did not agree with decision that state additional punishment of indemnity to state. The indemnity should be delivered directly to PT Pos Outer City Branch Nanga Serawai.

Keywords: state finance, legal entity, state loss

ABSTRAK

Ini adalah penelitian yuridis normatif. Ini menganalisa masalah oleh penelitian sastra untuk mendapatkan data sekunder. Untuk melengkapi dan mendukung data yang diperoleh dari studi kepustakaan, studi lapangan juga dilakukan untuk memberikan gambaran deskriptif, yang menggambarkan objek masalah dengan cara yang menyeluruh dan sistematis.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis apakah status hukum kekayaan negara yang ditempatkan di PT Pos Cabang Luar Kota Nanga Serawai dan apa tanggung jawab manajemen pada manajemen risiko PT Pos Cabang Luar Kota Nanga Serawai.

Hasil penelitian menunjukkan kekayaan negara yang ditempatkan di PT Pos Cabang Luar Kota Nanga Serawai adalah kekayaan negara yang ditempatkan BUMN sehingga merupakan bagian dari kekayaan negara. Penulis setuju dengan pertimbangan pengadilan Korupsi di pengadilan Pontianak kasus memeriksa PT Pos Cabang Luar Kota Nanga Serawai Kabupaten Sintang No: 01/Pid.Sus/Tipikor/2012/PN.PTK tanggal 4 April 2012. Tanggung jawab pada manajemen risiko PT Pos Cabang Luar Kota Nanga Serawai yang telah melakukan pelanggaran kewajiban fidusia yang mengarah ke tanggung jawab pribadi sehingga Rakhmad Yusuf dihukum dengan tanggung jawab pidana dan perdata. Indemnity ditempatkan pada terdakwa Rakhmad Yusuf adalah tanggung jawab pribadi atas kerugian perusahaan yang menderita karena pelanggaran hukum yang dilakukan oleh terdakwa telah melanggar kewajiban yang harus ia lakukan. Oleh karena itu tanggung jawab sipil. Penulis tidak setuju dengan keputusan yang menyatakan hukuman tambahan ganti rugi kepada negara. Ganti rugi akan langsung dikirimkan ke PT Pos Cabang Luar Kota Nanga Serawai.

Kata Kunci : keuangan negara, badan hukum, kerugian negara

BAB. I

Pendahuluan

Pada masa reformasi Kejaksaan menjadi salah satu lembaga penegak hukum yang menjadi sorotan, khususnya dalam penanganan Tindak Pidana Korupsi. Penanganan tindak pidana korupsi memiliki banyak tantangan dan persoalan salah satunya adalah menentukan kerugian Negara yang menjadi syarat pokok adanya tindak pidana korupsi. Dalam menentukan kerugian Negara dari suatu perbuatan tindak pidana korupsi tidak semudah yang dibayangkan dimana salah satu kendala yaitu adanya perdebatan mengenai kekayaan Negara yang dipisahkan terkait adanya suatu tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh suatu badan hukum perdata dan bisnis. Persoalan apa yang dimaksud dengan kekayaan Negara yang dipisahkan sudah menjadi perbedaan pendapat yang sangat lama antara kalangan teoritis dibidang hukum perdata dan hukum bisnis¹. Perdebatan permasalahan mengenai kekayaan Negara yang dipisahkan dikarenakan adanya teori badan hukum baik dari teori fiksi, teori harta kekayaan atau teori organ semua menjelaskan bahwa badan hukum memiliki sifat adanya kekayaan terpisah, namun apa yang dimaksud dengan kekayaan terpisah tidak ditemukan penjelasannya².

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah badan usaha yang modalnya sebagian besar atau seluruh modalnya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara³. Pengelolaan BMUN harus dilakukan seoptimal mungkin untuk mewujudkan perekonomian nasional yang sehat, tangguh dan mandiri yang tujuan pokoknya adalah untuk menyejahterahkan rakyat Indonesia. Di Indonesia penyalahgunaan pengelolaan BUMN yang berakibat merugikan keuangan Negara menjadi tantangan tersendiri bagi penegak hukum khususnya Kejaksaan Republik Indonesia dimana kejahatan dibidang pengelolaan yang makin kompleks dan rumit serta tuntutan dari masyarakat untuk mendorong pembersihan praktek-praktek Korupsi, Kolusi dan Nepetisme dilingkungan BMUN.

Salah satu kasus penyimpangan terhadap pengelolaan BUMN yang terjadi di Kalimantan Barat adalah Kasus yang terjadi pada PT Pos Cabang Luar Kota Nanga Serawai. Penyimpangan yang dilakukan oleh oknum Kepala Kantor PT PT Pos Cabang Luar Kota Nanga Serawai berakibat PT Pos Cabang Luar Kota Nanga Serawai mengalami kerugian dikarenakan uang kas kantor perseroan telah digunakan secara pribadi oleh oknum Kepala Kantor PT PT Pos Cabang Luar Kota Nanga Serawai. Perbuatan oknum Kepala Kantor PT PT Pos Cabang Luar Kota Nanga Serawai telah diputus oleh Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak dengan nomor putusan 01/Pid.Sus/Tipikor/2012/PN.PTK pada hari rabu tanggal 4 April 2012. Dari uraian tersebut diatas penulis tertarik untuk menulis Pengelolaan Keuangan Negara yang Dipisahkan Oleh Badan Hukum (Analisis terhadap Kasus Kerugian Negara Yang Terjadi Pada PT Pos Cabang Luar Kota Nanga Serawai).

2. Masalah

Dari uraian latar belakang masalah tersebut diatas penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut :

Apa status hukum terhadap kekayaan negara yang ditempatkan pada PT Pos Cabang Luar Kota Nanga Serawai ?

Bagaimana tanggungjawab pengelola terhadap resiko pengelolaan PT Pos Cabang Luar Kota Nanga Serawai ?

3. Pembahasan.

Dalam akta Nomor: 177 tanggal 20 Juni 1995 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Umum (Perum) Pos dan Giro menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pos Indonesia adalah perseoan yang bertujuan untuk menyelenggarakan usaha pelayanan jasa pos dan giro bagi masyarakat baik didalam maupun diluar wilayah indonesia, dalam rangka turut melaksanakan dan menunjang kebijaksanaan serta program Pemerintah. Modal PT Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pos Indonesia berasal dari Negara Republik Indonesia yang ditetapkan sebesar Rp. 750.000.000.000,- (tujuh ratus lima puluh milyar) rupiah yang terbagi dalam 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu) lembar saham yang terdiri dari 150.000 (seratus lima puluh ribu) lembar saham

¹ Nindyo Pramono, *"Kekayaan Negara Yang Dipisahkan Menurut UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN"*, *Permasalahan Seputar Hukum Bisnis: Persembahan kepada Sang Maha Guru*, Gitama Jaya, Jogjakarta, 2007. hlm. 128

² *Ibid*

³ Badan Usaha Milik Negara Selanjutnya dalam penulisan ini akan disingkat dengan BUMN.

prioritas dan 600.000 (enam ratus ribu) lembar saham biasa masing-masing dengan nominal Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Pendirian Kantor Pos Cabang Luar Kota Nanga Serawai Kabupaten Sintang tidak bisa dilepaskan dari keberadaan PT Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pos Indonesia sebagai perusahaan induk. Sebagaimana tersebut diatas bahwa Modal PT Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pos Indonesia berasal dari Negara Republik Indonesia hal ini tentu dapat di analogikan bahwa modal Kantor Pos Cabang Luar Kota Nanga Serawai Kabupaten Sintang berasal dari Negara Republik Indonesia.

Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi pada Kantor Pos Cabang Luar Kota Nanga Serawai menyatakan bahwa uang yang ditempatkan ditempatkan pada PT Pos Cabang Luar Kota Nanga Serawai adalah masih merupakan kekayaan Negara. Pendapat majelis hakim tersebut mengacu pada pengertian keuangan Negara secara spesifik tidak diatur dalam stelsel tersendiri dalam Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Jo Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tidak Pidana Korupsi dimana keuangan Negara dimuat dalam penjelasan umum yang menegaskan bahwa keuangan Negara adalah:

“ Berupa seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik ditingkat pusat maupun di daerah

Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal Negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara. “

Persepsi bahwa BUMN menjadi bagian dari keuangan negara tidak bisa diabaikan begitu saja, karena hal ini sudah menjadi pendapat terutama aparat penegak hukum. Dalam yurisprudensi berbagai keputusan-keputusan pengadilan, aparat penegak hukum seperti jaksa dan pemeriksa, berpendapat bahwa BUMN merupakan bagian dari keuangan negara.

Pendapat Opini para penegak hukum tersebut berbeda dengan pendapat Erman Rajagukguk yang menyatakan bahwa dalam tuduhan korupsi juga dikenakan terhadap tindakan direksi BUMN dalam transaksi-transaksi yang didalilkan dapat merugikan Negara merupakan suatu kesalahan pengertian dan penerapan apa yang dimaksud dengan keuangan negara.⁴ Menurut Erman bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara menyatakan:

“ Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.”

Sementara itu sehubungan dengan ruang lingkup keuangan negara pada Pasal 2 huruf g Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara yang berbunyi:

“ kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah”.

Dalam penjelasan Undang-Undang Keuangan Negara berkaitan dengan pengertian dan ruang lingkup keuangan negara dijelaskan sebagai berikut:

“ Pengertian yang digunakan dalam merumuskan keuangan negara adalah dari sisi obyek, subyek, proses dan tujuan. Dari sisi obyek yang dimaksud dengan keuangan negara meliputi semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Dari sisi subyek dimaksud dengan keuangan negara meliputi seluruh obyek sebagaimana tersebut diatas dimiliki negara, dan/atau dikuasai oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, perusahaan negara/daerah, dan badan lain yang ada kaitannya dengan keuangan negara. Dari sisi proses, keuangan negara mencakup seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan pengelolaan obyek sebagaimana tersebut di atas mulai dari perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sampai dengan pertanggungjawaban. Dari

⁴ Erman Rajagukguk, *Nyanyi Sunyi Kemerdekaan Menuju Indonesia Negara Hukum Demokrati*, (Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Lembaga Studi Hukum dan Ekonomi, 2006), halaman 9

sisi tujuan keuangan negara meliputi seluruh kebijakan, kegiatan dan hubungan hukum atau penguasaan obyek sebagaimana tersebut diatas dalam rangka pemerintahan negara. Bidang pengelolaan keuangan negara yang demikian luas dapat dikelompokkan dalam sub bidang pengelolaan fiskal, sub bidang pengelolaan moneter, dan sub bidang pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan”.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, menyatakan:

“ Perbendaharaan Negara adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan yang ditetapkan dalam APBN dan APBD.”

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menyatakan:

“ Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200,000,000.- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1,000,000,000.- (satu milyar rupiah)”.

Dalam penjelasan undang-undang tersebut dijelaskan bahwa:

“ Dalam undang-undang ini dimaksud untuk menggantikan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang diharapkan mampu memenuhi dan mengantisipasi perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dalam rangka mencegah dan memberantas secara lebih efektif setiap bentuk tindak pidana korupsi yang sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara khususnya serta masyarakat pada umumnya. Keuangan negara yang dimaksud adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah;

Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban BUMN/BUMD, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.

Berdasarkan pasal-pasal tersebut aparat penegak hukum baik Polisi, Jaksa, dan BPK selaku pemeriksa, bertindak memeriksa Direksi BUMN Persero apabila ada dalam transaksi bisnisnya mengalami kerugian yang merupakan indikasi awal akan adanya potensi kerugian Negara. Dalam konsepsi keuangan negara yang dipisahkan sebagai penyertaan modal pada BUMN Persero adalah merupakan bagian dari kekayaan Negara sehingga apabila Direksi BUMN Persero dalam mengelola perusahaannya mengalami kerugian berpotensi merugikan keuangan negara. Maka aparat penegak hukum atas dasar perundang-undangan tersebut diatas akan memproses hal tersebut sebagai suatu tindak pidana Korupsi.

Permasalahan timbul sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara. Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara dijelaskan yang dimaksud dengan Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. BUMN terdiri Persero dan Perum dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara diatur bahwa:

“ Perusahaan perseroan, yang selanjutnya disebut persero, adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51 % (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan”.

BUMN Persero sebagai perseroan terbatas merupakan entitas bisnis yang memiliki kedudukan mandiri terlepas dari orang atau badan hukum lain dari orang yang mendirikan, pengaturannya tunduk pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Dari uraian tersebut diatas apabila dihubungkan dengan permasalahan yang dibahas oleh penulis yaitu kedudukan status hukum terhadap kekayaan negara yang ditempatkan pada PT Pos Cabang Luar Kota Nanga Serawai dapat ditarik kesimpulan status hukum kekayaan yang ditempatkan pada PT Pos Cabang Luar Kota Nanga Serawai adalah kekayaan perseroan yang terlepas dari orang atau badan hukum lain dari orang yang mendirikan yaitu pemerintah hal ini mengacu pada

pengaturan perseoan terbatas yang tunduk pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Pendapat sebagai mana tersebut diatas yang menyatakan bahwa status hukum kekayaan yang ditempatkan pada PT Pos Cabang Luar Kota Nangga Serawai adalah kekayaan perseroan yang terlepas dari orang atau badan hukum lain dari orang yang mendirikan tentulah berbeda dengan pendapat penegak hukum khususnya Kejaksaan.

Kejaksaan dalam menentukan status hukum kekayaan yang ditempatkan pada PT Pos Cabang Luar Kota Nangga Serawai tentu tidak lah secara asal atau tidak memiliki dasar. Dasar status hukum kekayaan yang ditempatkan pada PT Pos Cabang Luar Kota Nangga Serawai dapat dilihat dari Jaksa Penuntut Umum dalam menguraikan unsur dapat merugikan perekonomian Negara yang secara lengkap sebagai berikut:

“ Bahwa menurut penjelasan umum Undang-undang RI No. 31 Tahun 1999 disebutkan sebagai berikut :

Keuangan Negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dengan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara baik ditingkat pusat maupun daerah.

Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga milik negara/badan usaha milik negara, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ke tiga berdasarkan perjanjian dengan negara.

Perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberi manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat.

Berdasarkan fakta yuridis yang telah diuraikan dalam fakta persidangan, yang mendukung pembuktian unsur “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” adalah sebagai berikut :

Bahwa atas perbuatan Terdakwa yang telah menggunakan uang kas Kantor Pos Cabang Luar Kota Nanga Serawai untuk kepentingan pribadi tersebut telah telah merugikan keuangan negara sebesar Rp. 648.622.995,00 (Enam ratus empat puluh delapan juta enam ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah), atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Penyimpangan Dana PT. Pos Indonesia (Persero) di Kantor Pos Cabang Luar Kota Nanga Serawai Kabupaten Sintang Tahun 2010 yang dibuat oleh Auditor pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Kalimantan Barat Nomor : SR-1593/PW14/5/2011 tanggal 5 Juli 2011”

Dari uraian tersebut diatas dapat diperoleh suatu kesimpulan bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam perkara PT. Pos Indonesia (Persero) di Kantor Pos Cabang Luar Kota Nanga Serawai Kabupaten Sintang berpandangan bahwa status hukum kekayaan yang ditempatkan pada PT Pos Cabang Luar Kota Nangga Serawai adalah bagian dari kekayaan Negara sebagaimana diatur dalam Undang-undang RI No. 31 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa Keuangan Negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dengan segala hak dan kewajiban yang timbul karena berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga milik negara/badan usaha milik Negara.

H.A.S.Natabaya dalam rapat dengan Panitia Hak Angket Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang Pengusutan Kasus Bank Century, berpendapat bahwa uang Lembaga Penjamin Simpanan merupakan keuangan negara. H.A.S.Natabaya berpegangan pada Undang-Undang Keuangan Negara dalam memberikan jawaban tersebut. Batu pijakan untuk menentukan termasuk keuangan negara atau tidak dalam kasus ini terutama dilihat dalam Pasal 2 huruf g dan i Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyatakan bahwa

“ Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Negara bergubungan dengan pelaksana hak dan kewajiban meliputi kekayaan Negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan Negara atau perusahaan daerah dan kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah”

Dasar lain yang digunakan untuk menentukan bahwa kedudukan kekayaan Negara yang ditempatkan pada Badan Usaha Milik Negara adalah adanya audit dari BPK. Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan diatur bahwa:

“ Badan Pemeriksa Keuangan Negara yang selanjutnya disebut BPK adalah lembaga Negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar republik Indonesia 1945 “

Tugas dan kewenangan Badan pemeriksa Keuangan sendiri diatur dalam Pasal 6 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan yaitu

“ BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Pelayanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan Negara ”

Dari uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat dua pendapat yang menyatakan status hukum terhadap kekayaan negara yang ditempatkan pada PT Pos Cabang Luar Kota Nanga Serawai yaitu bahwa kekayaan Negara yang ditempatkan pada PT Pos Cabang Luar Kota Nanga Serawai adalah masih kekayaan Negara dan yang berpendapat bahwa kekayaan Negara yang ditempatkan pada PT Pos Cabang Luar Kota Nanga Serawai bukan merupakan kekayaan Negara lagi. Namun demikian penulis sependapat dengan argument yang menyatakan bahwa kekayaan Negara yang ditempatkan pada PT Pos Cabang Luar Kota Nanga Serawai adalah masih kekayaan Negara sebagaimana juga pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak yang tertuang dalam pertimbangan putusan dalam perkara Rakhmad Yusuf.

Hal ini didasarkan pada kondisi Tindak Pidana Korupsi yang sudah pada titik nadir dimana korupsi di negeri ini sudah begitu parah, mengakar, bahkan sudah membudaya hamper disetiap lapisan birokrasi, baik legislatif, maupun yudikatif serta telah pula menjalar ke dunia usaha.⁵ Penentuan status hukum kekayaan yang ditempatkan pada PT Pos Cabang Luar Kota Nanga Serawai telah memiliki dasar yang kuat karena bersumber pada peraturan perundang-undangan yang ada. Perbedaan pendapat mengenai status kekayaan Negara yang ditempatkan pada perseroan dikarenakan memang terjadi ketidak sinkronan terhadap perundang-undangan antara yaitu Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas namun demikian dengan semangat yang sama untuk memberantas Tindak Pidana Korupsi harusnya perbedaan pendapat tidak menghalangi upaya pemerintah untuk melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.

Dalam teori hukum bisnis direksi memiliki kewajiban untuk melaksanakan amanah yang diberikan perseroan (fiduciary duties) sehingga dengan amanah tersebut direksi wajib menjalankan kepengurusan perseroan sebaik mungkin semata-mata hanya untuk kepentingan perseroan. Dalam Pasal 92 Ayat (1) UUPT diatur bahwa Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. Selanjutnya ayat (2) diatur bahwa Direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/ atau anggaran dasar. Anggota direksi wajib melaksanakan tugasnya dengan itikad baik (in good faith) dan dengan penuh tanggung jawab (and with full sense of responsibility). Selama hal tersebut dijalankan, para anggota direksi tetap mempunyai tanggung jawab yang terbatas yang merupakan ciri utama dari suatu perseroan atau perseroan terbatas. Namun apabila hal tersebut dilanggar, artinya anggota direksi yang bersangkutan bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya, yang bersangkutan bisa dikenakan tanggung jawab penuh secara pribadi. Direksi yang menyalahgunakan kedudukannya sebagai pemegang amanah perseroan atau apabila bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya yang mengakibatkan perseroan menderita kerugian, maka setiap anggota direksi bertanggungjawab secara pribadi sebagaimana diatur dalam Pasal 97 Ayat (3) UUPT yang mengatur bahwa setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh

⁵ Muhammad Yusuf, *Merampas Aset Koruptor Solusi Pemberantasan Korupsi di Indonesia*, PT Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2013 hlm.3

secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya. Anggota direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pribadi atas kerugian yang menimpa perseroan jika dapat membuktikan sebagai berikut:⁶
 kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
 telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
 tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
 telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Tingkat tanggung jawab sebagai kriteria tanggungjawab Direksi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya, dapat dibeda-bedakan sebagai berikut:⁷

Fiduciary Duty

Dalam hal ini yang dimaksud adalah tugas yang terbit dari hubungan fidusia antara direksi dan perseroan yang dipimpinnya, yang menyebabkan direksi berkedudukan sebagai trustee dalam pengertian hukum trust. Seorang direktur harus memiliki kepedulian dan kemampuan (*duty of care and skill*), itikad baik, loyalitas, dan kejujuran terhadap perseroan dengan derajat tinggi (*high degree*).

Tugas Mempedulikan (*duty of care*)

Tugas mempedulikan yang diharapkan dari direksi adalah *duty of care* sebagaimana dimaksud dalam hukum tentang perbuatan melawan hukum. dalam arti, direksi berbuat atau bertindak secara hati-hati agar terhindar dari kelalaian (*negligence*).

Bentuk tanggungjawab Direksi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya dapat dikwalifikasikan sebagai berikut:

Tanggungjawab Perdata.

Lahirnya suatu tanggung jawab hukum berawal dari adanya perikatan yang melahirkan hak dan kewajiban. Pasal 1233 KUH Perdata menyatakan hak dan kewajiban (perikatan) bersumber dari perjanjian dan undang-undang. Perikatan yang bersumber dari undang-undang terbagi lagi menjadi perbuatan menurut hukum dan perbuatan melawan hukum. Timbulnya perikatan yang bersumber dari perjanjian membebankan kepada para pihak yang melakukan perjanjian untuk melaksanakan hak dan kewajibannya (prestasi). Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan prestasi maka dapat dikategorikan telah melakukan wanprestasi. Secara umum pertanggung jawaban perdata dapat diartikan sebagai konsekuensi hukum atas pelanggaran hak dan kewajiban, baik hak dan kewajiban yang lahir dari perjanjian maupun yang lahir dari undang-undang, yang membawa kerugian kepada orang atau badan lain. Adapun pengertian ganti kerugian adalah penggantian biaya, kerugian, dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perjanjian dan pemenuhannya baru diwajibkan apabila debitur dinyatakan lalai (Pasal 1234 KUH Perdata). Dengan demikian, pada dasarnya ganti kerugian adalah ganti kerugian yang timbul karena debitur melakukan wanprestasi. Unsur-unsur ganti kerugian menurut ketentuan Pasal 1246 KUH Perdata terdiri dari 3 (tiga) unsur, yaitu:

Biaya, yaitu segala pengeluaran atau ongkos-ongkos yang nyata-nyata telah dikeluarkan.

Rugi, yaitu kerugian karena kerusakan barang-barang kepunyaan kreditur yang diakibatkan oleh kelalaian debitur.

Bunga, yaitu keuntungan yang seharusnya diperoleh atau diharapkan oleh kreditur apabila debitur tidak lalai.

Berdasarkan ketentuan Pasal-pasal 1365 dan 1366 KUH Perdata, direksi (artinya semua anggota direksi) secara pribadi dapat ikut dipertanggungjawabkan atas kerugian yang diderita pihak ketiga karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perseroan. Khusus mengenai arti dan cakupan perbuatan melawan hukum sebaiknya diperhatikan bahwa perbuatan melawan hukum adalah suatu perbuatan atau kelalaian tidak melakukan yang seharusnya dilakukan yang:

melanggar hak orang lain; atau

bertentangan dengan kewajiban pelaku; atau bertentangan dengan kesusilaan baik; atau

bertentangan dengan kehati-hatian (*zorgvuldigheid*) yang patut dilaksanakan terhadap keselamatan orang lain atau barang miliknya.

⁶ Pasal 97 Ayat (5) UUPT

⁷ Ridwan Khairandy, *Kekayaan Negara yang Dipisahkan di Badan Usaha Milik Negara, Khususnya Perusahaan Perseroan dan Kaitannya Tindak Pidana di Korupsi*, hlm 26.

Tanggung jawab tersebut juga dapat menimpa Dewan Komisaris apabila mereka menjabat selaku direksi karena direksi tidak ada sehingga Dewan Komisaris dalam kedudukan tersebut melakukan perbuatan atas nama perseroan yang merugikan pihak ketiga dan bahkan juga pemegang saham yang terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan perseroan.

Tanggungjawab Pidana.

Pertanggung jawaban pidana tidak bisa dipisahkan dari perbuatan pidana yang berarti bahwa tidak ada perbuatan pidana maka tidak akan ada pertanggung jawaban pidana. Hal berlaku dalam hukum pidana Indonesia yang menyatakan tidak ada pidana tanpa kesalahan. Uraian tentang konsep dasar pidana akan meliputi uraian tentang:⁸

Unsur-unsur suatu tindak pidana (element of crimes);

Klasifikasi tindak pidana;

Pertanggung jawaban pidana (criminal liability);

Alasan-alasan pengurangan atau penghapusan pidana (criminal defenses).

Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang mengandung unsur perbuatan atau tindakan yang dapat dipidana dan unsur pertanggung jawaban pidana kepada pelakunya. Sehingga dalam syarat hukuman pidana terhadap seseorang secara ringkas dapat dikatakan bahwa tidak ada hukuman pidana terhadap seseorang tanpa adanya hal-hal yang secara jelas dapat dianggap memenuhi syarat atas kedua unsur tersebut. Tindak pidana hanyalah menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan itu dengan suatu pidana, kemudian apakah orang yang melakukan perbuatan itu juga dijatuhi hukum pidana sebagaimana telah diancamkan akan sangat tergantung pada soal apakah dalam melakukan perbuatannya itu si pelaku juga mempunyai kesalahan. Sedangkan sebagai dasar pertanggung jawaban adalah kesalahan yang dapat di pidana serta berdasarkan kejiwaannya itu pelaku dapat dicela karena kelakuannya itu. Dengan kata lain, hanya dengan hubungan batin inilah maka perbuatan yang dilarang itu dapat dipertanggung jawabkan kepada si pelaku.

Direksi sebagai personifikasi perseroan, yang mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan mempunyai tanggung jawab yang sangat berat, sebagaimana dalam ketentuan dalam Pasal 59 KUHP yang menyatakan:

“ Dalam hal-hal pelanggaran ditentukan pidananya diancamkan kepada pengurus, anggota-anggota badan pengurus, atau komisaris-komisaris, maka tidak dipidana pengurus, anggota badan pengurus atau komisaris yang ternyata tidak ikut campur melakukan pelanggaran tersebut”.

Tanggungjawab Direksi atas kerugian Perseroan tidak serta merta menjadi beban tanggung jawab pribadi direksi apabila tindakan direksi telah melakukan dengan iktikad dan tindakan tersebut semata-mata untuk kepentingan perseroan, tetapi ternyata perseroan tetap menderita kerugian. Hal tersebut terjadi karena dalam hukum perseroan, dikenal doktrin business judgment rule yang mengajarkan bahwa direksi perseroan tidak bertanggungjawab atas kerugian yang timbul dari suatu tindakan pengambilan putusan, apabila tindakan tersebut didasarkan pada iktikad baik dan hati-hati. Direksi mendapat perlindungan hukum tanpa perlu memperoleh pembenaran dari pemegang saham atau pengadilan atas keputusan yang diambilnya dalam konteks pengelolaan perusahaan.⁹ Apabila tindakan direksi yang menimbulkan kerugian tidak dilandasi iktikad baik, maka ia dapat dikategorikan sebagai pelanggaran fiduciary duty yang melahirkan tanggung jawab pribadi.

Dalam perkara pada Kantor Pos Cabang Luar Kota Nanga Serawai sebagaimana telah disebutkan diatas bahwa Post Master Nanga Serawai Rakhmad Yusuf telah menggunakan uang Kas Kantor Pos Cabang Luar Kota Nanga Serawai sekitar Rp. 648.622.995,00 (Enam ratus empat puluh delapan juta enam ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah) untuk kepentingan pribadinya. Pengadilan Negeri Pontianak menyatakan Rakhmad Yusuf bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan subsidiair Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sehingga terdakwa Rakhmad Yusuf dijatuhi hukuman pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Selain pidana pokok Rakhmad Yusuf juga dijatuhkan pidana tambahan berupa uang pengganti kepada Negara sebesar Rp. 566.972.917,- (lima ratus enam puluh enam ribu Sembilan ratus tujuh puluh dua Sembilan

⁸ Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2000 hlm.55.

⁹ Ridwan Khairandy, *Op,Cit*.hlm 27

ratus tujuh belas rupiah). Perbuatan Rakhmad Yusuf dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang melanggar kewajiban fiduciary duty, maka lahir tanggung jawab pribadi dimana kerugian tidak dilandasi iktikad baik, maka ia dapat dikategorikan sebagai pelanggaran fiduciary duty yang melahirkan tanggung jawab pribadi yang berarti Rakhmad Yusuf harus mengganti kerugian tersebut. Rakhmad Yusuf dalam perkara ini bersalah atau lalai menjalankan tugasnya dapat menimbulkan kerugian bagi perseroan maka dapat dimintakan tanggungjawabnya atau dilakukan upaya hukum baik dalam bentuk gugatan perdata maupun tuntutan pidana.

Putusan yang dijatuhkan pada Rakhmad Yusuf menurut penulis adalah bentuk pertanggungjawab yang dibebankan kepada Rakhmad Yusuf tidak hanya tanggungjawab Pidana namun tanggungjawab Perdata yang dijadikan satu. Hal dapat di cermati pada putusan Pengadilan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak yang selain menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan Pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta) rupiah juga dijatuhkan pidana tambahan berupa uang pengganti kepada Negara sebesar Rp. 566.972.917,- (lima ratus enam puluh enam ribu Sembilan ratus tujuh puluh dua Sembilan ratus tujuh belas rupiah). Uang pengganti bukan utang terdakwa sehingga tidak ada hubungan keperdataan antara terdakwa yang telah merugikan negara sehingga negara perlu menggugat secara keperdataan baik atas dasar wanprestasi atau perbuatan melawan hukum.¹⁰

Uang pengganti yang dibebankan kepada terdakwa Rakhmad Yusuf menurut penulis adalah tanggungjawab secara pribadi atas kerugian yang diderita perseroan karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa telah bertentangan dengan kewajiban yang seharusnya dijalankan oleh terdakwa sehingga merupakan tanggungjawab perdata.

Putusan uang pengganti dapat dipersamakan dengan konsekwensi pelanggaran fiduciary duty yang melahirkan tanggung jawab pribadi yang harus mengganti kerugian tersebut sejalan dengan peraturan peraturan Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana tersebut diatas. Namun demikian penulis tidak sependapat dengan amar putusan yang menyatakan bahwa pidana tambahan berupa uang pengganti kepada Negara sebesar Rp. 566.972.917,- (lima ratus enam puluh enam ribu Sembilan ratus tujuh puluh dua Sembilan ratus tujuh belas rupiah) dimana konsekwensi dari putusan tersebut bahwa uang pengganti sebesar sebesar Rp. 566.972.917,- (lima ratus enam puluh enam ribu Sembilan ratus tujuh puluh dua Sembilan ratus tujuh belas rupiah) harus disetor ke Kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi dalam perkara Kantor Pos Cabang Luar Kota Nanga Serawi seharusnya dikembalikan kepada Kantor Pos Cabang Luar Kota Nanga Serawi, bukan kepada negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak. Uang pengganti dalam perkara Kantor Pos Cabang Luar Kota Nanga Serawi merupakan harta kekayaan perseroan dalam hal ini Kantor Pos Cabang Luar Kota Nanga Serawi sendiri.

4. Penutup.

Berdasarkan pembahasan tentang Pengelolaan Keuangan Negara yang Dipisahkan Oleh Badan Hukum (Analisis terhadap Kasus Kerugian Negara Yang Terjadi Pada PT Pos Cabang Luar Kota Nanga Serawai) yang telah diuraikan dimuka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

Kekayaan negara yang ditempatkan pada PT Pos Cabang Luar Kota Nanga Serawai adalah kekayaan Negara yang ditempatkan Badan Usaha Milik Negara sehingga bagian dari kekayaan Negara. Penulis sependapat dengan pertimbangan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa perkara Kantor Pos Cabang Luar Kota Nanga Serawai Kabupaten Sintang No:01/Pid.Sus/Tipikor/2012/PN.PTK tanggal 4 April 2012 yang

¹⁰ Mungki Hadipratikno, *Eksekusi Putusan Pidana Uang Pengganti dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*, hlm. 13

menyatakan bahwa kekayaan yang berada pada Kantor Pos Cabang Luar Kota Nanga Serawai Kabupaten Sintang merupakan bagian dari keuangan Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf g dan i Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan penjelasan umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Tanggungjawab pengelola terhadap resiko pengelolaan PT Pos Cabang Luar Kota Naga Serawai yang telah melakukan perbuatan pelanggaran fiduciary duty yang melahirkan tanggung jawab pribadi sehingga Rakhmad Yusuf dikenakan tanggungjawab Pidana dan Perdata sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Pontianak No:01/Pid.Sus/Tipikor/2012/PN.PTK tanggal 4 April 2012 yang pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan Pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta) rupiah juga dijatuhi pidana tambahan berupa uang pengganti kepada Negara sebesar Rp. 566.972.917,- (lima ratus enam puluh enam ribu Sembilan ratus tujuh puluh dua Sembilan ratus tujuh belas rupiah). Uang pengganti yang dibebankan kepada terdakwa Rakhmad Yusuf menurut penulis adalah tanggungjawab secara pribadi atas kerugian yang diderita perseroan karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa telah bertentangan dengan kewajiban yang seharusnya dijalankan oleh terdakwa sehingga merupakan tanggungjawab perdata. Penulis tidak sependapat dengan amar putusan yang menyatakan bahwa pidana tambahan berupa uang pengganti kepada Negara yang seharusnya uang pengganti langsung diserahkan kepada PT Pos Cabang Luar Kota Naga Serawai.

Daftar Pustaka

Buku-buku:

Ashshofa Burhan, Metode Penelitian Hukum, Cet.1., PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1996

Andi Hamzah dan RM Surachman, Jaksa di Berbagai Negara, Sinar Grafika, Jakarta, 1995

Ali Chidir, Badan Hukum, Alumni, Bandung, 1987

Atmadja Arifin P. Soeria, Keuangan Publik Dalam Prespektif Hukum Teori, Praktek dan Kritik, Rajawali Pers, Jakarta, 2010

Atmasasmita Romli, Perbandingan Hukum Pidana, Mandar Maju, Bandung, 2000

Badruzaman Mariam Darus, Komplikasi Hukum Perikatan Dalam Rangka Memperingati Memasuki Masa Purna Bakti Usia 70 Tahun, Citra Aditya Bandung, 2001

-----, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Hukum: Hukum Perikatan Dengan Penjelasannya, Alumni, Cetakan kedua, Bandung, 1996

Bahsan M., Penilaian jaminan Kredit Perbankan Indonesia, Rejeki Agung, Jakarta, 2001

Chatamarrasjid, Menyingkap Tabir Perseroan, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000

Djumhana Muamad, Hukum Perbankan Di Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung

Effendy Marwan, Korupsi dan Pencegahan, Timpani, Jakarta, 2010

Elly Erawati dan J.S. Badudu, Kamus Hukum Ekonomi, Inggris-Indonesia, Proyek Elips, Jakarta, 1996

Fuady Munir, Hukum Perusahaan Dalam Paradigma Hukum Bisnis, Citra Aditya Bakti Bandung, 1999

-----, Doktrin-doktrin Modern Dalam Corporate Law Dan Eksistensinya Dalam Hukum Indonesia, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002,

Ilmar Aminuddin, Hak Menguasai Negara Dalam Privatisasi BUMN, Kencana Prenada Media Group, Jakarta 2012

Khairandy Ridwan, Perseroan terbatas:Doktrin, Peraturan Perundang-Undangan dan Yurisprudendi, Kreasi Total Media, Yogyakarta, 2009

Komariah, Hukum Perdata, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2004

Lukman Markus, Penerapan Metode Statistik Non Parametrik Dalam Penelitian Hukum, Romeo Grafika, Pontianak, 2007

Margono Sujud, Hukum Perusahaan Indonesia Catatan Atas UU Perseroan Terbatas, Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, 2007

Mertokusumo Sudikno, Mengenai Hukum Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta, 2000

Muhammad Abdulkadir, Hukum Perikatan, Alumni, Bandung 1982

-----, Hukum Perusahaan Indonesia, PT Citra Aditya Bakti, Bandung 2002

Pramono Nindyo, "Kekayaan Negara Yang Dipisahkan Menurut UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN", Permasalahan Seputar Hukum Bisnis: Persembahan kepada Sang Maha Guru, Gitama Jaya, Jogjakarta, 2007

Prayitno Dwija dan Muladi, Pertanggung Jawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana, Bandung: Sekolah Tinggi Hukum, 1991

Nurdin Adriani, Kepailitan BUMN Persero Berdasarkan Asas Kepastian Hukum, PT Alumni, Bandung, 2012

Purba Orianton, Petunjuk Praktis Bagi RUPS, Komisaris, dan Direksi Perseroan Terbatas Agar Terhindar Dari Jerat Hukum, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2011

Purwosutjipto H.M.N, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Jilid.2. Djambatan, Jakarta, 1982

Prasetya Rudhi, Perseroan terbatas Teori dan Praktek, Sinar Grafika, Jakarta, 2011

Rajagukguk Erman, Nyanyi Sunyi Kemerdekaan Menuju Indonesia Negara Hukum Demokrati, (Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Lembaga Studi Hukum dan Ekonomi, 2006)

RM Surachman dan Andi Hamzah, Jaksa di Berbagai Negara, Sinar Grafika, Jakarta, 1995

Harahap M. Yahya, Segi-Segi Hukum Perjanjian, Alumni Bandung, 1986

Salim H.S, Hukum Kontrak Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak, Sinar Grafika, Jakarta, 2003

Satrio J., Hukum Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian Buku I, Citra Aditya Bandung, 1995

Sihombing Jonker, Tanggungjawab Yuridis Bankir Atas Kredit Macet Nasabah, PT. Alumni, Bandung, 2012

Subekti & R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Edisi Revisi, PT Pradya Paramita, Jakarta, 1996.

Subekti, Hukum Perjanjian, Intermasa, Jakarta, 2002

Soekanto Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum, UI-Press Jakarta, 1984

Tjandra W. Riawan, Hukum Keuangan Negara, Grasindo, Jakarta, 2006

Yusuf Muhammad, Merampas Aset Koruptor Solusi Pemberantasan Korupsi di Indonesia, PT Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2013

Makalah:

Satjipto Raharjo, Perkembangan Ilmu Hukum Dewasa Ini, Makalah Kuliah Umum Pembukaan Program Magister Hukum Universitas Gadjah Mada pada tanggal 03 September 2007.

Mustofa Kamal, Dilema Jati Diri Keuangan Negara, <http://www.pusdiklatwas.bpkp.go.id>.

Alvi Syahrin, Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi Dalam Pencemaran Dan Atau Kerusakan Lingkungan Hidup, (Medan: Jurnal Hukum, Magister Ilmu Hukum, PPs USU, 2005)

Mungki Hadipratikno, Eksekusi Putusan Pidana Uang Pengganti dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi.